

Affiliation:

Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

***Correspondence:**

widyas@umy.ac.id

This Article is Available in:

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/13485>

DOI:

<https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.13485>

Citation:

Widiastuti, H., Yunianto, A., &
Rahmawati, E. (2022). Evaluasi Tata
Kelola Keuangan dan Sistem Akuntansi
di BUMDes Mekaring Pono Potorono.
*Jati: Jurnal Akuntansi Terapan
Indonesia*, 5(2), 131-143.

Article History

Received:

09 June 2022

Reviewed:

13 July 2022

Revised:

12 September 2022

Accepted:

31 October 2022

Topic Article:

Akuntansi Sektor Publik

Article Type: Research Paper

Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Sistem Akuntansi di BUMDes Mekaring Pono Potorono

Harjanti Widiastuti*, Andan Yunianto, Evi Rahmawati

Abstract:

This study aimed to evaluate financial governance and accounting systems through analysis of business processes and transactions at BUMDes Mekaring Pono Potorono to develop an accounting system. This research is qualitative descriptive research with a case study approach. Qualitative data were obtained through Group Focus Discussion (FGD), interviews, observations, and documentation. The informants of this research are the director of BUMDes, the treasurer of BUMDes, and the head and treasurer of BUMDes business units. The results showed that BUMDes Mekaring Pono Potorono did not yet have accounting and financial statements policies, so business units had not prepared financial statements. Instead, BUMDes business units have made simple financial records through the general ledger. Still, they need to be supported by recording in the subsidiary ledgers and standardizing transaction documents to increase data reliability. Business processes and transactions analysis helps BUMDes determine and classify financial statement accounts. Standardization of records and data reliability are important for developing accounting systems.

Keywords: Village-Owned Enterprise, Business Unit, Accounting System, Institutional Governance

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi tata kelola keuangan dan sistem akuntansi melalui analisis proses bisnis dan transaksi di BUMDes Mekaring Pono Potorono untuk keperluan pengembangan sistem akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data kualitatif diperoleh melalui Group Focus Discussion (FGD), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, serta kepala dan bendahara unit-unit usaha BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Potorono belum memiliki kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga unit-unit usaha belum menyusun laporan keuangan. Unit-unit usaha BUMDes telah melakukan pencatatan keuangan sederhana melalui buku kas umum, tetapi perlu didukung dengan pencatatan di buku pembantu serta standarisasi dokumen transaksi untuk meningkatkan keterandalan data. Analisis proses bisnis dan transaksi membantu BUMDes menentukan dan mengklasifikasi akun-akun laporan keuangan. Standarisasi pencatatan dan keterandalan data menjadi penting untuk pengembangan sistem akuntansi.

Kata Kunci: BUMDes, Unit Bisnis, Sistem Akuntansi, Tata Kelola Kelembagaan

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan Desa dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dikenal dengan UU Desa. Sebelumnya, Desa menjadi sub ordinat pemerintah daerah yang berimplikasi pada terbatasnya hak desa mengatur rumah tangganya (Herdiana, 2020). Tujuan utama implementasi UU Desa dalam menciptakan kemandirian desa, baik kemandirian Pemerintah Desa, maupun kemandirian masyarakat desa. Dengan demikian, lahirnya UU Desa menunjukkan optimisma untuk merealisasikan otonomi desa dalam pengembangan Desa (Herdiana, 2020). Desa sebagai organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan, dan terdekat dengan masyarakat, sehingga pembangunan desa menjadi prioritas penting (Laru & Suprojo, 2019). Berbagai peraturan perundangan dikeluarkan pemerintah untuk mengimplementasikan UU Desa, seperti PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Kewenangan untuk mengatur rumah tangganya berimplikasi pada kucuran dana pada pemerintah Desa, yaitu dana desa. Dana desa menjadikan desa sebagai wilayah yang berpotensi menjadi pusat perkembangan ekonomi (Erlina & Sirojuzilam, 2020). Kondisi ini memberikan otonomi bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya ekonominya (Pratama, 2017; Riantono, 2014).

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014, setiap desa memperoleh sejumlah dana dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara spesifik (disebut Dana Desa) untuk memaksimalkan potensi sumberdaya desa. Salah satu tujuan pemberian dana desa adalah meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengamanatkan Desa untuk membentuk BUMDes. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berperan penting baik di bidang ekonomi, pelayanan masyarakat hingga bidang usaha. Keberadaan BUMDes semakin strategis karena perannya sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa (Widiastuti et al., 2019).

Kemendes PDTT No. 4 Tahun 2014 Bab III Bagian II Pasal 12 mengatur tentang pengelolaan keuangan BUMDes dan menyatakan bahwa pelaksana operasional melakukan kegiatan sesuai dengan AD/ART dan berwenang membuat laporan keuangan setiap unit, membuat laporan perkembangan kegiatan per unit- unit usaha BUMDes setiap bulan, dan melaporkan perkembangan BUMDes kepada masyarakat melalui masyarakat desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun. Oleh karena itu, implementasi tata kelola keuangan merupakan upaya yang harus dilakukan BUMDes dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan operasional. Implementasi tata kelola keuangan diharapkan menghasilkan pelaporan keuangan BUMDes yang bermanfaat bagi stakeholder. Lebih lanjut, tata kelola bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dari organisasi (Supriatna & Kusuma, 2009; Yee et al., 2018).

Tata kelola yang baik tidak hanya sebagai sarana pertanggungjawaban tetapi untuk meningkatkan daya saing (Puspita et al., 2020). BUMDes perlu dikelola dengan baik sehingga tujuan pemerintah dan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, kinerja BUMDes harus terukur sehingga perlu adanya laporan keuangan yang handal sebagai dasar evaluasi kinerja dan informasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip tata kelola yang baik meliputi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (Putri & Putra, 2017). Entitas yang menerapkan prinsip tata kelola mampu meminimalkan resiko dalam

pengambilan keputusan. Selain itu, sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan lembaga, penerapan tata kelola yang baik juga dapat memberikan *value added* dan keberlanjutan bagi organisasi (Riantono, 2014; Ridlwan, 2014). Tata kelola bertujuan untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan BUMDes yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan (Erlina & Sirojuzilam, 2020). Namun, Widiastuti et al. (2019) menunjukkan BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola khususnya terkait akuntabilitas keuangan serta tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah.

Akuntansi berperan dalam menciptakan tata kelola lembaga yang baik melalui pelaporan keuangan yang relevan dan andal. Laporan keuangan merupakan komponen penting dalam rangka penciptaan akuntabilitas dan transparansi (Irawati & Martanti, 2018; Suprihastini et al., 2017). Lebih lanjut, laporan keuangan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas. BUMDes sebagai entitas perlu untuk menyusun laporan keuangan untuk menyajikan informasi tentang kondisi keuangan BUMDes (Bahri, 2020; Irawati & Martanti, 2018). BUMDes perlu bertransformasi dan beradaptasi menuju tata kelola khususnya tata Kelola keuangan yang baik agar tujuan pembentukan BUMDes dapat tercapai, salah satunya melalui implementasi sistem akuntansi BUMDes.

Penelitian ini berkaitan dengan teori *social enterprise*. *Social enterprise* tidak sekedar memiliki misi sosial tetapi juga menjalankan bisnis berdasarkan mekanisme pasar (Ebrahim et al., 2014; Nasruddin & Fahada Misaridin, 2014; Santos, 2012). BUMDes dibentuk sebagai respon atas masalah sosial yang ada di desa, tetapi BUMDes tetap berorientasi bisnis untuk menjaga keberlangsungan usahanya (Widiastuti et al., 2019). *Social enterprise* merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan atas kerjasama sekelompok orang atau organisasi masyarakat untuk menciptakan nilai sosial (Pestoff & Hulgård, 2016). Lebih lanjut, *social enterprise* dikaitkan dengan motivasi pro-sosial, mulai dari pemberian kekayaan, kerjasama, dan pengembangan masyarakat (Lumpkin et al., 2013). Misalnya, organisasi memperkejakan masyarakat sekitar (disabilitas). Oleh karena itu, organisasi harus mengintegrasikan antara keberlanjutan keuangan dan menciptakan nilai sosial ke dalam organisasi yang dikelola. Lebih lanjut, peneliti merujuk pada teori *stewardship*. *Steward* tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi melainkan lebih fokus untuk memaksimalkan kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991) meskipun BUMDes juga berorientasi mencari keuntungan secara finansial. Teori ini menjelaskan bahwa *steward* akan melayani dan berperilaku sesuai kepentingan bersama (Sofyani et al., 2020). Pengelola BUMDes berupaya menjalankan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan sosial dan keuangan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengevaluasi tata Kelola keuangan dan sistem akuntansi BUMDes (Ainiyah, 2022; Erlina & Sirojuzilam, 2020; Haeruddin & Mariana, 2021; Titioka et al., 2020). Erlina and Sirojuzilam (2020) meneliti tentang sosialisasi penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDes berbasis web. Penelitian ini melakukan beberapa kegiatan untuk memecahkan permasalahan di BUMDes Karya Tanjung, terutama untuk perbaikan tata kelola keuangan. BUMDes Karya Tanjung diketahui masih melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi yang sederhana. Hal tersebut berdampak pada pencatatan keuangan unit-unit usaha yang belum jelas. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah yang dihadapi karena pengurus belum memahami dengan baik tata kelola keuangan yang benar.

Kegiatan pengabdian dan penelitian mengenai pengelolaan keuangan BUMDes juga dilakukan Titioka et al. (2020) di Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan materi mengenai pengelolaan dan pengorganisasian BUMDes dan regulasinya, termasuk pengelolaan keuangan dan akuntansinya, serta pendampingan praktek penyusunan laporan keuangan BUMDes. Hasil penelitian dari kuesioner *pre test* pada pengelola BUMDes menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, dan pemahaman peserta mengenai regulasi, pengelolaan sampai dengan pelaporan keuangan yang baik masih sangat

terbatas. Pencatatan transaksi juga belum dilakukan dengan baik sehingga laporan keuangan yang disusun belum memenuhi standar akuntansi. Kegiatan pengabdian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta komitmen pengelola BUMDes untuk menata, mengelola dan mengembangkan BUMDes agar lebih baik dan maju.

Haeruddin and Mariana (2021) menganalisis sistem akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes “Mitra Mandiri” Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan. BUMDes Mitra Mandiri merupakan salah satu BUMDes terbaik di Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMDes belum memiliki sistem akuntansi dan melakukan pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar secara sederhana, 2) formulir-formulir seperti bukti kas masuk dan bukti kas keluar sebagai dasar pencatatan belum dibuat, sehingga pencatatan berdasarkan nota-nota dan bukti transaksi belum diarsipkan dengan baik, 3) BUMDes belum membuat pertanggungjawaban keuangan bulanan, hanya menyampaikan laporan keuangan di akhir tahun, dan 4) laporan keuangan BUMDes belum sesuai dengan standar akuntansi.

Ainiyah (2022) meneliti implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes Astagina Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) BUMDes telah menyusun laporan keuangan setahun dua kali dan dipaparkan dalam Musyawarah Desa sebagai pertanggungjawaban dan transparansi pada masyarakat, 2) penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual oleh bendahara dibantu sekretaris, dan belum mengimplementasi sistem informasi akuntansi berbasis *software* meski sudah memiliki *software* akuntansi, dan 3) penerapan SIA berbasis *software* dipersepsikan memudahkan menyusun laporan keuangan, tetapi intensi menggunakan masih rendah karena pemahaman serta motivasi menggunakan *software* yang rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan tata kelola keuangan dan sistem akuntansi melalui analisis proses bisnis dan transaksi serta sistem akuntansi unit bisnis di BUMDes Mekaring Pono Potorono. BUMDes Mekaring Pono Potorono dibentuk dan diinisiasi oleh pemerintah Desa Potorono pada tahun 2017. BUMDes ini menjadi salah satu BUMDes yang berkembang pesat dan menjadi percontohan di Kabupaten Bantul. BUMDes Potorono telah memiliki 6 unit bisnis yaitu Pasar Desa, UMKM Centre, Bumdes Mart, Wisata Desa, Pengelolaan Sampah, dan Potorono Edu Park yang masih proses pembangunan. Berkembangnya unit bisnis, baik dari jumlah dan keberagaman jenis usaha BUMDes perlu diimbangi dengan tata kelola dan sistem akuntansi yang memadai dari unit bisnis. Permasalahan di BUMDes Potorono adalah belum adanya pelaporan keuangan pada level unit bisnis, sehingga diperlukan analisis proses bisnis dan transaksi, serta sistem akuntansi di unit-unit usaha BUMDes. BUMDes Potorono telah bekerja sama dengan mitra konsultan untuk penyediaan *software* penyusunan laporan keuangan namun belum diimplementasikan karena belum siapnya data akuntansi yang andal serta daftar akun-akun laporan keuangan yang sesuai dengan transaksi yang ada.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi. Pertama, penelitian-penelitian sebelumnya menganalisis sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada level BUMDes, sedangkan penelitian ini melakukan analisis sistem akuntansi melalui analisis proses bisnis pada unit-unit usaha BUMDes. Penelitiann ini penting karena BUMDes yang memiliki beberapa unit usaha perlu mengkonsolidasi laporan keuangan uni-unit usaha BUMDes sehingga perbaikan tata Kelola keuangan BUMDes seharusnya dimulai dari pengelolaan keuangan unit usaha. Kedua, penelitian ini mengidentifikasi proses bisnis dan transaksi setiap unit usaha BUMDes sebagai input menyusun sistem akuntansi manual, baik formulir yang dibutuhkan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta akun-akun yang diperlukan untuk pencatatan transaksi. Kesiapan data akuntansi yang andal mendukung implementasi *software* penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat diduplikasi pada BUMDes lain dengan unit-unit usaha serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dan pengabdian ini dilakukan di BUMDEs Mekaring Pono Potorono Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September hingga Desember 2021. Kegiatan penelitian dan pengabdian melibatkan dosen, mahasiswa, pengelola BUMDes Potorono, serta mitra BUMDes dalam pengembangan software akuntansi, yaitu Syncore Consultant. Pengelola BUMDes yang menjadi informan adalah Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, serta kepala dan Bendahara Unit-unit usaha BUMDes. Penelitian dilakukan pada periode Agustus-Desember 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini ingin memotret tata Kelola keuangan unit-unit usaha melalui analisis proses bisnis, dan transaksi, serta prosedur pelaporan keuangan yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) focus group discussion (FGD), (2) wawancara, (3) observasi, dan dokumentasi, dan (4) sosialisasi dan pendampingan. Pelaksanaan FGD melibatkan dosen, mahasiswa, dan para pengelola BUMDes untuk memperoleh gambaran umum kegiatan dan tata Kelola keuangan BUMDes dan unit-unit usaha. Untuk mengetahui secara lebih rinci proses bisnis dan transaksi setiap unit usaha, dilakukan wawancara dengan kepala dan bendahara masing-masing unit usaha BUMDes. Data terkait pencatatan transaksi dan pelaporan diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan penelusuran terhadap dokumen pendukung terkait sistem akuntansi dari BumDes Potorono. Selain itu, peneliti juga menggunakan data berupa hasil observasi lapangan dan dokumen yang digunakan untuk menguatkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

Metoda analisis data dalam penelitian ini mengikuti prosedur analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (1994), yaitu

1. Reduksi data, peneliti akan memilih dan memfokuskan data mentah yang dikumpulkan untuk mengklasifikasikan, mengurutkan dan mengorganisasikan data menjadi informasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.
2. Penyajian data, peneliti akan menyajikan informasi ke dalam penjelasan deskriptif mengenai proses bisnis, dan sistem akuntansi tiap-tiap unit bisnis
3. Penarikan kesimpulan, peneliti akan memberikan kesimpulan atas deskripsi data dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Potorono merupakan organisasi desa yang berdiri sebagai sarana mengelola berbagai kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. BUMDes Mekaring Pono Potorono dibentuk dan diinisiasi oleh pemerintah Desa Potorono pada tahun 2017 dan secara resmi didirikan pada Maret 2018. BUMDes Potorono terletak di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Potorono memiliki luas 3,90 km² dengan batas wilayah desa meliputi 9 pedukuhan, yakni: Pedukuhan Potorono, Pedukuhan Salakan, Pedukuhan Prangwedan, Pedukuhan Nglaren, Pedukuhan Mertosanan Wetan, Pedukuhan Condrowangsan, Pedukuhan Mertosanan Kulon, Pedukuhan Balong Lor, dan Pedukuhan Banjardadap. BUMDes Potorono.

BUMDes Potorono merupakan salah satu BUMDes di kabupaten Bantul yang berkembang pesat dengan berbagai inovasi usaha yang dilakukan. BUMDes Potorono memiliki beberapa unit usaha antara lain: BUMDes Mart, Potorono Edu Park, Pasar Desa, Pengelolaan Sampah, Taman Kuliner dan UMKM Center, dan Embung Potorono. BUMDes Mart merupakan toko yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat seperti alat tulis

kantor, fotokopi, dan aneka makanan camilan khas Potorono. Selain itu, BUMDes Mart menyediakan Wifi Corner bagi warga yang ingin mengakses internet. Potorono Edu Park adalah wahana wisata air, kuliner serta menjadi tempat edukasi masyarakat. Berbagai wahana disediakan oleh Potorono Edu Park, seperti wahana track sepeda, wahana budidaya ikan, wahana lahan produktif, dan wahana bermain di sungai. Potorono Edu Park masih dalam proses pembangunan dan belum beroperasi. Pasar Desa terletak di pinggir Jalan Wonosari. Pasar desa ini sangat strategis karena di pinggir jalan nasional dan terdapat setidaknya 200 pedagang Los serta 25 Pedagang Kios. Pengelolaan Sampah bekerja sama dengan KSM salakan Bersemi. Pengelolaan sampah diharapkan mampu mengatasi sampah di Potorono. Taman kuliner dan UMKM Center dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan memasarkan produk. Embung Potorono sebagai wahana bermain dan bersantai yang didalamnya terdapat embung sebagai ikon Potorono.

Hasil Evaluasi tata Kelola keuangan dan Pemetaan Proses Bisnis

Proses bisnis yaitu urutan aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu bisnis untuk memperoleh, menghasilkan, serta menjual barang dan jasa (Rama, 2008). Dalam rangka pengembangan sistem, maka proses bisnis ini dapat dilihat sebagai suatu siklus transaksi. Pemetaan proses Bisnis dilakukan untuk mendapatkan informasi kegiatan-kegiatan ekonomik utama, pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab, serta bagaimana kegiatan ekonomi tersebut didokumentasikan, dicatat dan dilaporkan. Hasil evaluasi tata Kelola keuangan menunjukkan:

1. BUMDes Potorono belum memiliki kebijakan pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes maupun unit-unit usaha BUMDes, termasuk kebijakan pengendalian kas.
2. BUMDes memosisikan sebagai holding bagi unit-unit usaha dan berencana mengkonsolidasikan pelaporan keuangan unit usaha keuangan untuk kepentingan pelaporan keuangan BUMDes. Namun demikian, hingga saat penelitian dilakukan hubungan BUMDes dengan beberapa unit usaha (Pasar Desa, Wisata Desa/Embung Potorono, dan Pengelolaan Sampah) masih pada tahap koordinasi dan konsolidasi untuk memasukkannya ke dalam kendali manajemen BUMDes karena unit-unit usaha tersebut sudah berdiri sebelum BUMDes didirikan. Unit usaha yang sudah berdiri sebelum pendirian BUMDes sudah memiliki kebijakan pengelolaan keuangan sendiri sehingga memerlukan waktu untuk menyesuaikan dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang diharapkan oleh BUMDes.
3. Proses penggabungan unit-unit usaha yang sebelumnya ada secara kelembagaan di bawah kendali manajemen BUMDes masih pada tahap awal. BUMDes sebagai perpanjangan tangan Desa yang terkait dengan urusan ekonomi masih dalam proses dan secara bertahap melakukan pendekatan untuk dapat mengatur tata kelola keuangan unit-unit usaha tersebut, terutama untuk unit-unit usaha yang telah berdiri sebelum BUMDes, agar tidak menimbulkan resistensi.
4. Unit-unit usaha BUMDes belum memberikan kontribusi hasil usaha ke BUMDes, kecuali unit usaha Pasar Desa. Unit usaha Pasar Desa menyetorkan kontribusi pada Desa (Pendapatan Asli Desa/PADes) yang sebelumnya disetorkan ke Desa, kemudian dialihkan disetorkan ke BUMDes sebagai perpanjangan tangan Desa. Besaran kontribusi bukan dari sisa hasil usaha.
5. Unit-unit usaha BUMDes belum menyusun anggaran dan target kontribusi PADes, belum melakukan penatausahaan keuangan dengan baik, dan belum menyajikan laporan keuangan sebagai dasar kontribusi BUMDes ke PADes. Ketentuan bahwa bahwa sisa hasil usaha menjadi besaran kontribusi PADes belum dapat direalisasikan.
6. BUMDes juga belum memiliki kebijakan terkait dengan pengadaan dan pengelolaan aset tetap (belanja modal), sehingga unit usaha dapat melakukan belanja modal.

Pemetaan proses bisnis dan analisis transaksi difokuskan pada unit-unit usaha BUMDes Potorono. Hasil pemetaan proses bisnis BUMDes dan unit-unit usaha BUMDes disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pemetaan Proses Bisnis

Proses Bisnis	Deskripsi proses Bisnis BUMDes
Siklus Penerimaan	penyertaan modal desa, penerimaan hibah, Penerimaan setoran dari unit usaha, Penerimaan dari kunjungan/studi banding, dan Penerimaan dari event yang diselenggarakan BUMDes
Siklus Pengeluaran	pengeluaran untuk honor pegawai, kegiatan operasional, dan pembelian aset tetap

Adapun proses bisnis untuk masing-masing unit usaha BUMDes adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Transaksi Unit Bisnis BUMDes

Unit Usaha	Siklus Penerimaan	Siklus Pengeluaran
Toko Desa/BumdesMart	penjualan barang dan pulsa (Telpon dan Internet) serta pemberian jasa fotocopy	belanja persediaan, belanja pegawai/honor, belanja aset seperti perlengkapan, dan belanja operasional bulanan
Wisata Desa/ Embung Potoro	Pemberian jasa parkir, penyewaan lapak untuk pedagang, dan persewaan wahana permainan.	belanja pegawai/honor dan belanja operasional bulanan
Taman Kuliner dan UMKM Centre	penyewaan tempat berjualan bagi pedagang	belanja pegawai/honor dan belanja operasional bulanan
Pengelolaan Sampah	Penyediaan jasa pengambilan sampah, pembelian dan penjualan sampah anorganik, pengolahan sampah organik, penjualan pupuk, bank sampah, penerimaan bagi hasil investasi kano	belanja persediaan bahan baku pupuk, belanja operasional (listrik, air), pembelian perlengkapan, pembelian sampah anorganik, dan belanja honor/gaji.
Pasar Desa	penyewaan los/kios, penyediaan jasa parkir, dan penyediaan fasilitas pasar kepada pedagang (kebersihan, listrik, air)	belanja operasional, belanja pegawai, belanja perlengkapan, dan belanja modal

Hasil evaluasi proses bisnis menunjukkan kegiatan utama sekaligus menggambarkan siklus penerimaan dan pengeluaran utama pada BUMDes Potorono dan unit-unit usaha yang dimiliki. Hasil pemetaan proses bisnis dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan dan pengklasifikasi daftar akun (chart of account) yang diperlukan dalam pengembangan sistem akuntansi. Berdasarkan hasil pemetaan proses bisnis, peneliti merekomendasikan daftar akun untuk dientri dalam Sistem Aplikasi Akuntansi BUMDes (SAAB).

Hasil Evaluasi Sistem Akuntansi Unit-unit Usaha BUMDes

Evaluasi sistem akuntansi dilakukan dengan melihat prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas, pihak-pihak yang bertanggung jawab, formulir, dan catatan. Evaluasi sistem akuntansi memfokuskan pada siklus utama BUMDes, yaitu siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas. Berikut ini adalah hasil evaluasi sistem akuntansi yang berjalan di unit-unit usaha BUMDes Potorono:

Tabel 3. Evaluasi Sistem Akuntansi

Komponen	Uraian
Personal	Semua unit usaha BUMDes memiliki bendahara, dan petugas lapangan yang bertugas menerima kas dari konsumen. Pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes dilakukan oleh bendahara
Bukti transaksi	<p>Transaksi ada yang disertai bukti transaksi, ada yang tidak disertai bukti, namun dicatat di buku.</p> <ol style="list-style-type: none"> Di unit usaha embung Potorono, penarikan retribusi parkir dan pedagang tidak diberikan karcis, namun dicatat dibuku. Sedangkan untuk penarikan sewa wahana permainan sudah disertai tiket sewa sebagai bukti transaksi. Penarikan uang sewa bulanan di taman kuliner tidak disertai bukti transaksi, namun dicatat dalam kartu pedagang Di pasar desa, penerimaan iuran kebersihan (retribusi) pedagang sudah menggunakan karcis retribusi. Penerimaan iuran listrik dari sebagian pedagang yang usahanya menggunakan listrik tidak disertai bukti transaksi (karcis). Penerimaan sewa los/kios tahunan oleh pedagang telah disertai bukti kuitansi. Penjualan barang, pulsa, dan jasa fotocopy belum menggunakan cash register sehingga disertai bukti transaksi, namun penjualan dicatat dalam buku.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Bendahara sudah melakukan pencatatan sederhana terkait penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku kas umum Di semua unit usaha, penyerahan kas dari petugas ke bendahara belum disertai bukti transaksi (bonggol karcis/retribusi). Bendahara mencatat transaksi berdasarkan catatan petugas lapangan. Hanya pencatatan sewa kios/los tahunan di pasar desa yang didasarkan atas bukti transaksi. Di semua unit usaha, penyerahan kas dari petugas ke bendahara belum disertai dokumen/bukti setor yang diketahui dua belah pihak (petugas lapangan dan bendahara). Di semua unit usaha, belum memiliki kebijakan pengendalian kas, seperti penyetoran kas ke bank. Bendahara belum membukukan piutang sewa untuk sewa kios/los yang menunggak.
Formulir	<ol style="list-style-type: none"> BUMDesmart: Buku catatan penjualan harian, dan buku kas umum Taman kuliner: kartu pedagang untuk mencatat sewa bulanan, catatan penerimaan kas harian, dan buku kas umum Pasar Desa: buku catatan penarikan iuran kebersihan, buku catatan iuran listrik, buku kas umum Embung Potorono: buku catatan retribusi, buku kas harian Pengelolaan Sampah: buku catatan penjualan, buku catatan jasa pengambilan sampah, buku catatan tabungan sampah, buku kas umum
Laporan	Unit usaha belum menyusun laporan keuangan

Dari evaluasi sistem akuntansi di unit-unit usaha BUMDes, terdapat temuan terkait tata Kelola keuangan BUMDes Potorono yang mendasar. Pertama, BUMDes Potorono belum memiliki pedoman kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan, terutama pelaporan keuangan unit-unit usaha BUMDes. Perlu disepakati apakah semua unit usaha diperlakukan sebagai unit usaha yang harus menyusun laporan keuangan tersendiri dan akan dikonsolidasi dalam laporan keuangan BUMDes, atau diperlakukan sebagai kegiatan usaha BUMDes. BUMDes Potorono belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK Etap). Ketiadaan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan menyebabkan unit-unit usaha belum menyusun laporan keuangan, sehingga penentuan kontribusi unit usaha berdasarkan sisa hasil usaha belum dapat diterapkan. BUMDes Potorono perlu menyusun kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan mendasar untuk menjadi acuan pelaporan keuangan unit-unit usaha. Berdasarkan petunjuk teknis nomor PED-12/D5/05/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa, standar akuntansi yang disarankan untuk penyajian laporan keuangan BUMDes, sesuai dengan Permendes PDPT No. 43 Tahun 2014 Pasal 26, adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Permasalahan belum ada kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan menjadi permasalahan sebagian besar BUMDes. Widiastuti et al. (2019) menunjukkan sebagian besar BUMDes belum memiliki kebijakan akuntansi secara tertulis, serta belum memiliki dokumen tata kelola keuangan. Beberapa penelitian lainnya juga menemukan bahwa BUMDes belum memiliki pedoman kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan belum menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP (Adithya et al., 2022; Afkarina et al., 2022; Hamzah et al., 2019; Lintong et al., 2020; Rozalia et al., 2021).

Kedua, keterandalan data akuntansi masih perlu diperbaiki. Keterandalan data akuntansi dapat ditingkatkan dengan adanya bukti transaksi untuk setiap transaksi, serta dokumen/bukti setor kas yang diketahui petugas lapangan dan bendahara sebagai dasar pencatatan transaksi oleh bendahara dengan disertai bukti transaksi untuk diarsip. Salah satu contoh, peneliti merekomendasikan bukti setor kas sederhana untuk retribusi parkir dan penyewaan wahana air di unit usaha wisata desa sebagai berikut:

BUMDes MEKARING PONO LAPORAN PENYEWAAN FASILITAS				
UNIT USAHA : Desa Wisata				
Hari/ Tanggal :				
No.	Jenis Fasilitas	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	Kano Besar			
2	Kano Kecil			
3	Bebek			
4				
Total:				
Petugas			Tanggal menerima: / /	
			Bendahara	
()		()		

Gambar 1. Bukti Setor Kas Penyewaan Wahana Air

BUMDes MEKARING PONO LAPORAN PARKIR				
UNIT USAHA : Desa Wisata				
Hari/ Tanggal :				
No.	Jenis Kendaraan	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	Mobil			
2	Sepeda Motor			
3	Sepeda			
4				
Total:				
Petugas			Tanggal menerima: / /	
			Bendahara	
()		()		

Gambar 2. Bukti Setor Kas Retribusi Parkir

Laporan penerimaan atau Bukti setor kas dari petugas ke bendahara dijadikan dasar untuk pencatatan penerimaan kas oleh bendahara disertai dengan bukti transaksi (missal bonggol karcis parkir). Agar dapat diimplementasikan, bukti setor kas dapat didesain sesederhana mungkin dan dengan biaya yang murah (misal printout dan fotocopy), namun informatif dan meningkatkan keterandalan data akuntansi. Keterandalan data akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas pengelola unit usaha yang akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes.

Keterandalan data akuntansi juga dapat ditingkatkan melalui standarisasi formulir pencatatan transaksi yang digunakan, dengan mempertimbangkan karakteristik transaksi masing-masing unit usaha BUMDes. Berdasarkan evaluasi terhadap formulir-formulir pencatatan, semua unit usaha BUMDes sudah melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku kas umum yang terdiri dari kolom kas masuk, kas keluar, dan saldo. Untuk kebutuhan

menyiapkan data agar mudah dientri ke software penyusunan laporan keuangan BUMDes, maka buku kas umum perlu distandarisasi dengan menambahkan klasifikasi akun, atau untuk akun-akun yang sering digunakan dapat dibuatkan kolom tersendiri. Bendahara dapat membuat formulir kas umum dengan program excel untuk kemudian secara berkala untuk dimasukkan dalam sistem. Berikut ini alternatif buku kas umum yang bisa dibuat oleh unit-unit usaha BUMDes.

BUMDes MEKARING PONO
Buku Kas Umum Halaman:

UNIT USAHA :

Bulan/Tahun :

No.	Tanggal	Akun	Keterangan	Bukti	Masuk	Keluar	Saldo
1							
2							
3							

Mengetahui
Ketua Bendahara

() ()

Gambar 3. Alternatif 1 Buku Kas Umum

BUMDes MEKARING PONO
Buku Kas Umum Halaman:

UNIT USAHA :

Bulan/Tahun :

No.	Tgl	Akun	Ket	Bukti	Penerimaan				Pengeluaran					
					Usaha	Retribusi	Sewa	Lainnya	Gaji	Fotocopy	Konsumsi	ATK	Pemeliharaan	Lainnya
1														
2														
3														

Mengetahui
Ketua Bendahara

() ()

Gambar 4. Alternatif 2 Buku Kas Umum

Berdasarkan analisis transaksi, unit usaha BUMDes juga perlu membuat buku pembantu. Buku pembantu yang dibutuhkan adalah kartu Gudang pada unit usaha BUMDesMart agar dapat mencatat harga pokok penjualan (HPP). Unit usaha pasar desa juga perlu membuat buku pembantu untuk sewa kios/los agar dapat membukukan piutang pada akhir tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara, beberapa pedagang menunggak membayar sewa kios/los tahunan bahkan sampai dua tahun. Dengan buku pembantu sewa kios/los akan memudahkan bendahara membuat penyesuaian untuk mencatat pengakuan piutang.

Ketiga, kebijakan pengendalian internal, khususnya pengendalian kas, belum ada. BUMDes perlu mendesain sistem pengendalian internal dengan sumberdaya yang dimiliki. Lingkungan pengendalian perlu diupayakan dengan membangun kesadaran pengendalian bagi petugas, dan pengelola BUMDes. Dengan Pengendalian kas diperlukan untuk memastikan keamanan aset khususnya kas. BUMDes perlu menyusun kebijakan pengendalian internal mendasar secara tertulis seperti perlunya unit usaha membuka rekening di Bank, periode penyetoran kas ke bank.

Keempat, pemanfaatan teknologi dalam penyusunan laporan keuangan belum diimplementasikan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, BUMDes Potorono telah bermitra dengan BUMDes.id untuk penggunaan software Sistem Aplikasi Akuntansi BUMDes (SAAB.Syncore). Software SAAB merupakan software keuangan sederhana yang berbasis jurnal umum dan buku kas masuk dan keluar. Namun demikian, software tersebut belum diimplementasikan karena kendala belum adanya kebijakan akuntansi dan pelaporan di level unit usaha. Kebutuhan mendasar bagi BUMDes Potorono untuk pemanfaatan software SAAB

adalah ketersediaan data akuntansi yang andal serta klasifikasi akun yang sesuai dengan proses bisnis unit-unit usaha, serta kesiapan dan intensi bendahara untuk menggunakan software tersebut.

Perbaikan tata Kelola keuangan dan sistem akuntansi BUMDes merupakan upaya pengelola sebagai steward untuk mengelola BUMDes secara akuntabel, dan transparan sesuai dengan teori stewardship. Pengelola BUMDes mengedepankan pencapaian visi dan misi BUMDes meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meninggalkan kepentingan pribadinya, jika itu berlawanan atau menghalangi pencapaian tujuan BUMDes. Beberapa penelitian menemukan bahwa sistem akuntansi akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas. Perbaikan sistem akuntansi juga perlu didukung dengan pengendalian internal yang baik. Beberapa penelitian menemukan pentingnya pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas (Apriliani et al., 2021) dan transparansi. Terakhir, BUMDes Potorono perlu memberikan pelatihan dan memotivasi bendahara-bendahara untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi khususnya penggunaan software SAAB untuk menyusun laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi. Upaya-upaya perbaikan tata Kelola keuangan, dan sistem akuntansi, serta peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan dapat dilakukan BUMDes dengan membangun Kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BUMDes Potorono belum memiliki kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan serta kebijakan pengendalian tertulis yang akan menjadi pedoman bagi BUMdes maupun unit usaha, sehingga unit usaha belum menyusun laporan keuangan. BUMDes Potorono masih dalam tahap konsolidasi kelembagaan karena beberapa unit usaha BUMDes sudah berdiri sebelum berdirinya BUMDes. BUMDes juga perlu meningkatkan keterandalan data akuntansi melalui perbaikan prosedur, pencatatan transaksi disertai dengan bukti transaksi, serta melengkapi formulir dan catatan. Standarisasi pencatatan transaksi akan menghasilkan data yang terklasifikasi sehingga memudahkan implementasi penggunaan software SAAB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adithya, R., Sari, W., & Prasetyo, H. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru, Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 6(1), 313-327.
- Afkarina, F. N., Probowulan, D., & Maharani, A. (2022). Penerapan Sak Etap Pada Bumdes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1075-1081.
- Ainiyah, G. Z. (2022). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Astagina. *Medikonis*, 13(2), 44-62.
- Apriliani, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kuningan. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(2), 172-189.
- Bahri, R. S. (2020). Model Design of Accounting Information Systems for Village Owned Enterprises (BUMDes). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64.

- Ebrahim, A., Battilana, J., & Mair, J. (2014). The governance of social enterprises: Mission drift and accountability challenges in hybrid organizations. *Research in organizational behavior*, 34, 81-100.
- Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan BUMDES Sistem Akuntansi BUMDES Berbasis Web. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(1), 282-287.
- Haeruddin, H., & Mariana, L. (2021). Analisis Sistem Akuntansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)(Studi Kasus: BUM Desa di Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 36-45.
- Hamzah, A. P., Priharjanto, A., & Purwanti, D. (2019). Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Dalam Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 198-214.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245-266.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan bumdes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *UNEJ e-Proceeding*, 41-51.
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 367-371.
- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes "Kineauan" Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(1), 95-101.
- Lumpkin, G. T., Moss, T. W., Gras, D. M., Kato, S., & Amezcua, A. S. (2013). Entrepreneurial processes in social contexts: how are they different, if at all? *Small Business Economics*, 40(3), 761-783.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nasruddin, E., & Fahada Misaridin, N. A. (2014). Innovationfor a Social Enterprise Business Model: an Analysis of Key Success Factors. *International Journal of Organizational Innovation*, 7.
- Pestoff, V., & Hulgård, L. (2016). Participatory governance in social enterprise. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 27(4), 1742-1759.
- Pratama, R. N. (2017). Kinerja badan usaha milik desa panggung lestari dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa panggungharjo kecamatan sewon kabupaten bantul. *Adinegara*, 6(2), 105-116.
- Puspita, V. A., Veranita, M., & Gunardi, G. (2020). Perbaikan Tata Kelola Bisnis UMKM Kerupuk Kulit Singkong menuju Ketahanan Bumdes Jagabaya. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 29-37.
- Putri, N. K. D. Y., & Putra, I. M. P. D. (2017). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Motivasi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1660-1688.
- Rama, J. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi 1*. Penerbit Salemba.
- Riantono, I. E. (2014). Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan. *Binus Business Review*, 5(1), 315-322.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangun Perekonomian Desa Fiat Justisia: *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Rozalia, S., Anitasari, M., & Ferina, Z. (2021). Analisis Penerapan SAK ETAP Pada BUMDes Luhur Sepakat Desa Sido Luhur Kabupaten Bengkulu Utara. *Disclosure. Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 19-28.
- Santos, F. M. (2012). A positive theory of social entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 111(3), 335-351.

- Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 325-359.
- Supriatna, N., & Kusuma, A. M. (2009). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *aset*, 382.
- Suprihastini, E., Akram, A., & Santoso, B. (2017). Effect of regional financial accounting system, internal control systems and regional financial audit on financial accountability of local government. *E-Proceeding STIE Mandala*.
- Titioka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. (2020). Pengelolaan Keuangan BUMDES di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), 197-216.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257-288.
- Yee, C. S., Sapiei, N. S., & Abdullah, M. (2018). Tax avoidance, corporate governance and firm value in the digital era. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 160-175.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 tentang Indeks desa membangun (2016). Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 (2016). Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (2015)

Acknowledgment

Penelitian dan pengabdian ini didanai melalui program Hibah Kedaireka Program Matching Fund Gelombang VIII Tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.